

‘MEMBANGUN’ NASIONALISME SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KONFLIK SARA DI INDONESIA

Idrus Ruslan*

Abstrak

Sebagai sebuah negara yang multi etnis serta memiliki berbagai macam keyakinan, Indonesia sangat rentan terjadi konflik yang bernuansakan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Maka untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir hal tersebut, diperlukan suatu sikap yang arif dan bijak yakni membangun semangat kebangsaan (Nasionalisme) pada semua elemen bangsa Indonesia. Kesadaran semangat kebangsaan bahwa kita semua adalah hidup dalam satu rumah yakni Indonesia, termasuk juga melihat aspek historis bahwa para pendiri bangsa ini telah berjuang mencapai kemerdekaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi, akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang damai.

Kata Kunci : Nasionalisme dan Solusi Konflik Sara

Pendahuluan

Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa, sosial budaya, bahasa dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sumber kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain, disamping itu kesemuanya merupakan potensi konflik jika tidak berjalan secara *sinergi*. Oleh karena itu pluralitas yang dimiliki bangsa¹ Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu persoalan strategis. Dikatakan persoalan strategis karena integrasi bangsa menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan

1* Dosen Mata Kuliah Hubungan Antar Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.

Menurut Benedict R.O.G. Anderson yang dikutip oleh Lambang Trijono; Bangsa esensinya merupakan sebuah komunitas terbayangkan, atau *imagined community*, hasil imanjinasi atau konstruksi warga bangsa mendiami atau hidup dalam sebuah wilayah teritori tertentu. Lihat Lambang Trijono, “Kebangkitan Nasional Memasuki Pertengahan Abad 21”, dalam Agus Wahyudi (ed.), *Seandainya Setiap Orang Indonesia Merdeka* (Yogyakarta : PSP UGM, 2008), h. 3.

prasyarat terciptanya stabilitas nasional yang sangat diperlukan bagi kelancaran pembangunan nasional.

Setelah Indonesia merdeka, musuh dalam arti kekuatan fisik (penjajah) negara lain sudah tiada, akan tetapi bersamaan itu muncul egoisme baik bersifat kesukuan, keagamaan, kedaerahan dan lain-lain, sehingga nasionalisme yang telah dibangun oleh pendiri bangsa ini seakan-akan hilang entah kemana. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi konflik yang berlatar belakang agama, suku, golongan dan lain-lain. Bahkan yang sangat merisaukan adalah dimana yang terlibat dalam suatu kerusuhan atau konflik tersebut adalah mahasiswa yang *nota bene* adalah para calon pemimpin dimasa mendatang. Pemandangan yang sangat ironis, ketika televisi menayangkan “perang” antar kampung seakan menjadi “hobi baru”, termasuk juga perang antar Fakultas pada sebuah Perguruan Tinggi di berbagai daerah, memaksa kita untuk mempertanyakan kembali masihkah terdapat rasa kebangsaan (nasionalisme) dihati mereka.

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud untuk memperbesar permasalahan yang kecil atau juga tidak bermaksud untuk mengorek luka lama, tetapi lebih pada sebagai bahan renungan bersama bagi kita semua bahwa pluralitas – terutama Suku, Agama, Ras dan Antargolongan – yang dimiliki oleh Indonesia haruslah disadari dan dimaknai dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Selain itu, masyarakat Indonesia perlu untuk mempertanyakan kembali tentang rasa kebangsaan (nasionalisme) yang ada pada diri mereka masing-masing. Hal ini dianggap penting, karena hanya dengan kedua wawasan tersebut, maka konflik yang mengatasnamakan SARA di bumi tercinta ini pun tidak akan terjadi.

Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah

Sebelum membahas tentang nasionalisme dalam perspektif sejarah, terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu sendiri. Secara umum dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan rasa kebangsaan, atau lebih tepatnya rasa memiliki terhadap bangsa pada setiap orang, sehingga dengan rasa tersebut seseorang akan membela, mempertahankan dan melindungi bangsanya dari ancaman ataupun gangguan dari bangsa lain, termasuk juga dari aksi oknum masyarakat pada bangsa itu sendiri yang membuat keresahan.

Jika merujuk pada Ensiklopedi Nasional Indonesia, ditemukan bahwa “nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena ada persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabadikan identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan Negara-negara yang bersangkutan”.²

Definisi kerja nasionalisme, sebagaimana dikutip oleh Anthony D. Smith, yang merujuk pada gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad membentuk “bangsa” yang aktual maupun bangsa “yang potensial”.³

Berdasarkan penegasan tersebut dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang ada pada masyarakat suatu bangsa akibat adanya persamaan sejarah, penderitaan akibat penjajahan. Rasa kebangsaan tersebut melahirkan persatuan antar masyarakat suatu bangsa tanpa melihat perbedaan latar

²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta : Delta Pamungkas, 1997), Jilid XI, h. 31 dibawah kata “Nasionalisme”.

³Anthony D. Smith, *Nationalism: Theory, Ideology and History* (Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2001), h. 6-7.

belakang seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa dan lain-lain yang ingin hidup merdeka dan bebas dari penindasan dan penjajahan.

Cukup dapat dipahami bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sekarang merupakan buah hasil perjuangan pendiri bangsa yang telah berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa demi untuk mencapai kemerdekaan. Sebab mereka menyadari betapa menderitanya hidup dalam keadaan dijajah. Kesadaran sejarah akan kesamaan penderitaan akibat dijajah tersebut melahirkan semangat kebangsaan dan semangat persatuan yang pada akhirnya mencapai kemerdekaan.⁴

Dalam konteks ini, kita dapat mengutip pendapat Ramlan Surbakti bahwa setidaknya ada dua faktor yang dapat menyatukan rasa kebersamaan; *pertama*, adanya faktor sejarah; yakni persepsi yang sama tentang asal usul nenek moyang dan atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama yang disebabkan oleh penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Kemudian yang *kedua* adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni prinsip bersatu dalam perbedaan (*unity in diversity*). Bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara, atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi, tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa, adat istiadat, ras atau agama.⁵

4Kesamaan latarbelakang terutama penderitaan – akibat penjajahan – merupakan salah satu munculnya rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat, sehingga mereka bersepakat untuk berjuang bersama dalam rangka mencapai kemerdekaan.

5Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 44.

Bila ditarik lebih kebelakang lagi, dimana para pejuang kemerdekaan sebelumnya hanya melakukan penjajahan secara sendiri-sendiri atau maksimal hanya sebatas daerah tertentu saja, dan itu sangat sulit untuk mengusir penjajah. Lalu kemudian timbullah kesadaran mereka bahwa untuk melawan dan mengusir penjajah, maka diperlukan rasa persatuan secara luas tidak hanya di daerah masing-masing dan juga rasa cinta akan kebangsaan yang mendalam supaya cita-cita kemerdekaan yang diidam-idamkan dapat menjadi kenyataan.

Khusus pada awal-awal menjelang kemerdekaan, salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yakni Sukarno dalam berbagai kesempatan baik secara lisan maupun tulisan sangat bersemangat untuk membangkitkan rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Beliau sangat sadar, bahwa untuk membangkitkan nasionalisme tidak cukup hanya dengan persatuan saja, tetapi harus dilandasi dengan rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu ia banyak menyinggung harga diri (martabat) bangsa Indonesia yang harus dibangun melawan penghinaan yang dilakukan oleh Belanda.

Sukarno dan Hatta adalah sedikit elit intelektual dan pejuang pada saat gejolak revolusi Indonesia, yang menggunakan nasionalisme sebagai upaya politik untuk melawan kolonialisme dan imperialism dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia. Jika yang pertama menjadikan nasionalisme sebagai ideology bangsa dalam pigura proyek *nation-building*, maka yang belakangan lebih fokus pada promosi *state-building* dengan menggunakan *nation-state* yang ditinggalkan oleh penjajah untuk kemudian dikelola dengan cara-cara konstitusional. Sampai disini rasanya tidak berlebihan ketika Herbert Feith, seorang Indonesianis asal Australia, memberikan julukan pada

Sukarno sebagai “*solidarity makers*”, dan Hatta sebagai “*administrators/problem solvers*”.⁶

Penyuaraan tentang rasa kebangsaan atau nasionalisme sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh Sukarno atau tepatnya hanya pada awal-awal menjelang kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan, penyuaraan akan pentingnya nasionalisme telah pula di rintis oleh berbagai kalangan seperti yang dicanangkan pada saat lahirnya organisasi Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda. Bahkan lahirnya organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan lain-lain – yang menurut A.S Hikam disebut sebagai cikal bakal lahirnya *civil society* di Indonesia – turut pula menyuarakan akan pentingnya rasa persatuan kebangsaan guna membebaskan diri dari cengkraman penjajah.

Menakar Birahi Nasionalisme

Indonesia yang saat ini sedang membangun, tidak hanya membutuhkan para *designer* atau orang yang ahli dalam bidang pembangunan gedung bertingkat pencakar langit, jalan tol atau jembatan layang, bendungan kokoh, ahli pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Tetapi juga membutuhkan faktor non-struktural yaitu agama, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat agama. Sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama. Hal ini sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) – terlebih lagi kerusuhan atas nama agama – maka segala macam fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat turut pula menjadi “korban”.

⁶Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca : Cornell University Press, 1962), h. 35.

Fancis Fukuyama mengatakan bahwa dalam membangun suatu bangsa bukan hanya memerlukan modal material, tetapi juga membutuhkan modal sosial kultural suatu bangsa. Senada dengan pernyataan tersebut, Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin, juga memperluas cakupan penggunaan konsep modal yang melampaui batas-batas ekonomi. Selain modal dalam pengertian material, manusia juga membutuhkan modal lainnya yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial. Meskipun modal sosial dan spiritual tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, lanjut Marshall, tetapi tidak boleh dipandang tidak memiliki manfaat ekonomi. Modal sosial memberikan manfaat yang lebih luas daripada bidang ekonomi. Dengan demikian, modal-modal lainnya yang ada dalam suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial.⁷

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal modal sosial dan spiritual yaitu *support* atau dukungan secara moral dari masyarakat yang *notabene* adalah masyarakat yang beragama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat itu hidup dalam keadaan aman, tentram, damai dan rukun tanpa ada konflik yang bernuansa SARA.

Pada konteks ke-Indonesia-an pluralitas agama menyiratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh landasan Idiil yaitu Pancasila dengan mottonya “Bhinneka Tunggal Ika” yang secara sederhana dapat diartikan “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”, serta landasan konstitusional yaitu Undang-Undang

⁷Syamsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer*, (Malang : UMM Press. 2009), h. 77.

Dasar 1945 khususnya pasal 29. Indonesia – dalam bahasa sederhana – bukanlah negara yang berdasarkan agama (teokrasi), juga bukan negara yang sekular, tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya. Hal ini karena Pancasila mengandung nilai-nilai berbagai agama di Indonesia, begitu juga demokrasi dan kemanusiaan.

Akan tetapi nilai-nilai etis-universal yang terdapat dalam Pancasila yang sangat bersesuaian dengan semangat kebangsaan tidak sepenuhnya dijalankan oleh rakyat terutama pemerintah yang telah ada baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sehingga itu berimbas terhadap eksistensi Pancasila di zaman reformasi.

Pada awal era reformasi, nasionalisme seakan-akan sangat tabu untuk dibicarakan, sebagaimana yang diakui oleh Presiden SBY “Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis”.

Dilematisasi tersebut karena, membicarakan Nasionalisme disatu sisi orang akan dituduh tidak pro reformasi, tapi disisi lain, nyatanya setelah 15 tahun hidup dizaman reformasi, masih sangat banyak perilaku yang bertentangan dengan nilai dan semangat nasionalisme, misalnya korupsi yang telah menggurita disetiap instansi dan institusi yang ada; dari sipil hingga militer; dari swasta hingga pemerintah tidak terlepas dari tradisi ini. Hampir setiap hari kita disuguhi tontonan “fantastis”; kasus illegal logging, Bank Century, Perpajakan, Markus, “Istana” dalam penjara, Pelanggaran HAM, dan lain-lain yang melibatkan unsur aparat berwenang, yang sampai saat

ini masih menjadi awan gelap yang menyelimuti bumi pertiwi. Belum lagi masalah bentrokan dan kerusuhan dan terkadang bernusana SARA merenggut jiwa, harta dan yang terpenting stabilitas yang telah dibangun selama ini seakan hilang entah kemana akibat dari tidak dimilikinya lagi semangat kebangsaan. Rasa kesukuan, kedaerahan, keagamaan, muncul kepermukaan tanpa malu-malu sehingga menambah sederet masalah yang dihadapi pemerintah di era ini, termasuk juga masalah terorisme. Dalam konteks ini, menurut saya beranggapan fenomena tersebut sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, oleh karena itu diperlukan restorasi terhadap hakikat nasionalisme dengan cara memahami esensinya lalu diimplementasikan secara konkrit dalam kehidupan empirik. Karena nilai dan semangat nasionalisme sejatinya adalah luhur dan universal; menekankan semangat kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan, gotong royong, toleransi dan keadilan yang kesemuanya merupakan warisan dari leluhur kita.

Pernyataan tersebut berusaha untuk mengkritisi bahwa makna nasionalisme tidak boleh dibawa pada skup politik rezim pemerintahan tertentu. Sebab jika itu yang terjadi, maka tidak ada bedanya ketika rezim Orde Baru berkuasa dengan mengusung jargon nasionalisme sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Akibatnya nasionalisme pada masa Orde Baru terdapat *incoherence* (tidak ada pertalian). Menurut Barbara Goodwin, hal tersebut disebabkan empat faktor. *Pertama*, disebut sebagai *multiple and conflicting bases for "National Identity"*. Apa basis dari nasionalisme atau Identitas nasional kita? Apakah kesamaan bahasa, agama, etnis, atau merasa satu rumpun melayu atau lainnya. Tidak ada satu pun jawaban yang pasti dewasa ini karena memang banyak basisnya. Memang dari dulu hingga saat ini, basisnya yang selalu diangkat karena semangat anti-kolonialisme dan semangat kemerdekaan. Tetapi apa benar masyarakat Indonesia memiliki perasaan seperti itu apalagi

saat ini. Celakanya, basis yang saling *cross-cutting* ini sangat dekat dengan potensi konflik di dalam dirinya.

Kedua adalah *a licence for fragmentation*. Parahnya, fragmentasi atau konflik yang terjadi memang tidak ada batasnya sejauh ini. Ia bisa muncul dan tenggelam tanpa kita tahu berakhirnya seperti yang terjadi di Ambon dan Poso dan lain-lain.

Ketiga, adalah *the problem of multiple loyalties*. Sejalan dengan faktor sebelumnya, individu sebagai manusia yang tinggal atau merasa sebagai orang Indonesia, pada dasarnya memiliki loyalitas yang berlapis-lapis. Ia sebagai bagian dari keluarga, teman-teman, asosiasi politik, agama, lokalitas, kelompok etnis, kelompok linguistic, dan negara secara berbarengan. Ini yang biasa disebut oleh para sosiolog sebagai *cleavages* (perpecahan) dalam masyarakat, baik atas dasar kelas, ras atau agama.

Kemudian yang *keempat* adalah *circularity*. Ada sirkularitas antara identifikasi subjektivitas individu dan masyarakat yang sifatnya "voluntarist" atas subjektivitas ini juga didasarkan pada sesuatu yang objektif. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa sirkularitas terus berubah dan berkembang tergantung situasi dan kondisinya. Tidak ada kata statis apalagi final dan ditentukan oleh sebuah paksaan atau rekayasa yang penuh dengan "biaya sosial" bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia.⁸

Bercermin dari pengalaman Orde Baru tersebut, maka nasionalisme adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara jujur, ikhlas tanpa ada rekayasa ataupun paksaan dari sebuah institusi yang

⁸Barbara Goodwin, *Using Political Ideas*, fourth edition (John Wilery & Sons Ltd, 2003), h. 249-267.

disebut dengan negara. Sebab jika semangat nasionalisme muncul karena keterpaksaan, maka yang terjadi hipokritisasi nasionalisme.

Oleh karena itu, sudahkah kita semua bertanya kepada nurani apakah selama ini nasionalisme telah kita miliki telah dilakukan secara jujur, ikhlas, konsisten antara yang diucapkan dengan yang dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban. Hal ini penting untuk dijawab secara jujur. Atau barangkali kita masih menemukan ketidak konsistenan tersebut baik pada diri pribadi ataupun individu lain, apalagi individu tersebut sebagai panutan masyarakat.

Hampir setiap hari kita menyaksikan perilaku yang bertentangan dengan semangat nasionalisme; korupsi masih merajalela, kemunafikan terus terjaga dengan kokoh, pembalakan hutan secara liar dan lain-lain, bahkan masyarakat tidak segan untuk melakukan aksi main hakim sendiri, mereka tidak segan lagi untuk melakukan pembakaran gedung kantor Bupati misalnya – seperti yang terjadi di Bima NTB dan Mesuji Lampung – juga fasilitas umum lainnya, tanpa perasaan berdosa pun mereka melakukan tindakan kedzaliman seperti pembunuhan, hanya karena persoalan yang remeh temeh. Akibatnya stereotipe negatif seperti masyarakat barbar, tradisional, primitif pun secara spontan melekat pada masyarakat kita. Tetapi tidak adil rasanya, jika hanya menghakimi masyarakat kita yang berbuat aniaya, tanpa melihat permasalahan yang mereka alami secara utuh; sebut saja misalnya permasalahan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, hak asasi manusia, keadilan, disparitas antara kaya dan miskin juga masalah demokratisasi, setidaknya turut memiliki andil dan berkontribusi terhadap pemicu beringasnya masyarakat.⁹

Mungkin ada benarnya bahwa nasionalisme yang dimiliki masyarakat selama ini hanyalah bersifat etno-nasionalisme yakni nasionalisme berbentuk kelompok solidaritas atas rasa komunitas yang

⁹Idrus Ruslan, "Merawat Nasionalisme", dalam *Lampung Post* 12 Mei 2012, h. 12.

berdasarkan etnisitas. Ada upaya dalam proses tersebut, untuk merujuk pada perasaan subjektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dari kelompok yang lain. Etno-nasionalisme ini jika terus bertahan dan menjadi paradigma berpikir masyarakat, akan sangat merugikan.

Menurut Yudi Latif bahwa keinginan hidup menjadi satu bangsa tidak akan mengarah pada nasionalisme yang sempit dan tertutup. Ke dalam, kemajemukan dan aneka perbedaan yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang secara negatif sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan silang budaya. Sedangkan keluar, nasionalisme Indonesia juga merupakan nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.¹⁰

Nasionalisme Indonesia sebagaimana yang digagas para pendiri negara dan dirumuskan menjadi Ideologi negara Pancasila, bukanlah sebuah Chauvinisme ataupun rasialisme dan etnosentrisme yang memitiskan bangsa Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah semangat persatuan bangsa yang menyimpul semua elemen ke Indonesiaan tanpa melihat perbedaan latar belakang etnis, agama, budaya dan bahasa, untuk hidup dalam rumah bersama di tanah air Indonesia.¹¹

¹⁰Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2011), h. 372-373.

¹¹Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam* (Jakarta : RM Books, 2011), h. 101-102.

Karena itu menjadi tantangan kita saat ini untuk membangun rasa kebangsaan secara utuh dengan menghidupkan kembali spirit nasionalisme ketika pertamakali digemakan pada tahun 1908. Perhimpunan Boedi Oetomo lahir dengan tekad untuk menumbuhkan kesadaran rakyat akan pentingnya rasa kebangsaan dalam merebut kemerdekaan dari kolonialisasi. Selain itu, semangat sumpah pemuda yang pernah diikrarkan dalam menjaga rasa persatuan bangsa seharusnya juga dapat mengilhami kita untuk tetap membangkitkan rasa kebangsaan. Hal inilah setidaknya dapat dikemukakan bahwa membaca dan memahami sejarah perjuangan masa lalu menjadi sangat signifikan.

Saat ini (era modern), kita telah terbebas dari kolonialisasi dalam arti perang mengangkat senjata melawan musuh. Akan tetapi setelah merdeka haruskah rasa kebangsaan yang telah diwasiatkan oleh pendiri bangsa ini harus ditinggalkan. Jawabannya tentu tidak, sebab untuk mengawal Indonesia yang memiliki luas dari Sabang sampai Merauke bukanlah perkara mudah. Mengawal keamanan dan persatuan Indonesia bukan hanya berarti dengan menggunakan senjata, tetapi itu semua harus di balut dengan birahi nasionalisme yang tinggi. Dengan modal birahi nasionalisme yang kuat itulah merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan musuh-musuh abstrak seperti materialisme, hedonisme dan individualisme yang tengah mewabah di sebagian besar masyarakat Indonesia dan hal itu mengindikasikan masih lemahnya nasionalisme.¹²

Hal lain yang juga telah menjadi karakter manusia modern saat adalah materialistik oriented yaitu budaya pragmatisme dan hedonisme. Pragmatisme adalah cara pandang yang melihat sesuatu dari nilai manfaat yang dapat dihasil dari sesuatu. Jika ia bermanfaat secara praktis material, maka ia dianggap kebenaran yang bernilai. Demikian juga dengan budaya hedonisme, totalitas kehidupan semuanya diorientasikan untuk sebuah kenikmatan. Kebahagiaan

¹²Ruslan, "Merawat Nasionalisme"...., h. 12.

tertinggi adalah karena akumulasi yang banyak dari kenikmatan material, dan sebaliknya kesengsaraan adalah disebabkan manusia tidak menemukan kenikmatan. Motto yang paling terkenal dari kaum hedonis adalah “hidup untuk hari ini”. Dari sini dapat diasumsikan bahwa apa saja menjadi legal dan pantas demi sebuah kenikmatan. Pada proses selanjutnya dapat dipastikan bahwa akan terjadi peminggiran terhadap beberapa sisi dari kemanusiaan itu sendiri, terutama persoalan moralitas, etika juga agama.

Kiranya sudah saatnya kita dapat secara bersama-sama meningkatkan gairah birahi nasionalisme yang dirasa selama ini masih terkesan etno-nasionalisme, selain itu nasionalisme harus di tumbuh kembangkan pada setiap lapisan insan Indonesia sehingga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Nasionalisme wajib dibangun bukan hanya bagi para pejabat yang konon ditengarai lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga bagi rakyat biasa, termasuk bagi seluruh elemen bangsa ini agar supaya lebih mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi demi kemajuan bangsa.

Nasionalisme tentu saja tidak hanya dipahami sebagai semangat membela bangsa dengan cara mengangkat senjata untuk melawan penjajah yang ingin menguasai. Sebab jika pengertian nasionalisme hanya seperti itu, maka itulah yang dimaksud oleh Sukarno sebagai nasionalisme negatif – yang cuma bersadar pada apa yang bisa dilawan – tetapi yang lebih penting lagi adalah mengembangkan nasionalisme progresif, yaitu menekankan pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historis nasionalisme progresif bukan hanya mempertahankan-melainkan juga memperbaiki keadaan negeri.¹³

¹³Latif, *Negara Paripurna.....*, h. 377.

Untuk kepentingan itu, ada baiknya memperhatikan pendapat Weiner yang dikutip oleh Dadang Kahmad bahwa setidaknya ada dua strategi dalam membangun rasa kebersamaan pada sebuah masyarakat yang plural, yaitu *assimilation* dan *unity in diversity*. Asimilasi mengacu pada upaya proses menjadikan kebudayaan kelompok etnis yang dominan sebagai kebudayaan nasional. Dengan demikian, semua identitas golongan minoritas dituntut untuk meleburkan diri. Sementara strategi *unity in diversity* adalah upaya penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghilangkan identitas kebudayaan minoritas.¹⁴

Tentu saja yang menjadi pilihan kita adalah strategi kedua. Sebab, sebagai masyarakat yang multi etnis dan plural, tentu tidak boleh mayoritas mengintervensi minoritas. Sekecil apa pun kuantitas sebuah komunitas haruslah didudukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu nasionalisme yang hendak kita bangun adalah nasionalisme tanpa diskriminasi. Jika demikian, maka yang diperlukan adalah kematangan kebudayaan politik, sebab kematangan budaya politik akan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang mengancam integrasi nasional.

Kematangan kebudayaan politik sangat erat dengan usaha dan upaya kesediaan rakyat untuk memelihara integritas nasional. Semakin matang kebudayaan politik suatu bangsa, semakin besar pula kesediaan rakyat untuk memelihara integritas nasional.

Sebagai suatu negara yang multi etnis, proses pematangan kebudayaan politik Indonesia ditandai oleh dua gejala. *Pertama*, proses pematangan (pembentukan) kebudayaan politik nasional yang diwarnai oleh unsur-unsur kebudayaan lokal, terutama kebudayaan politik nasional kita masih dalam proses pembentukan. *Kedua*, proses pematangan kebudayaan politik pada tingkat lokal pada umumnya ditandai oleh kenyataan bahwa kebudayaan setempat telah lebih

¹⁴Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama; Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 149.

dahulu ada dibandingkan dengan struktur politik yang baru dikembangkan setelah negara memperoleh kemerdekaan. Sebagai konsekuensinya, masyarakat setempat menganggap struktur politik sebagai suatu hal yang asing sehingga jarang bisa diterima secara penuh. Di dalam penerimaan struktur politik oleh masyarakat setempat, telah kita lihat selama bangsa ini merdeka lebih dari setengah abad, interaksi antara kebudayaan dan struktur politik berlangsung pada frekuensi yang sangat tinggi. Selama proses ini pula, telah terjadi benturan-benturan fisik yang melibatkan masyarakat.¹⁵

Benturan-benturan yang terjadi, baik fisik maupun non fisik, dalam proses kematangan kebudayaan politik dapat dijadikan tolok ukur dari proses itu sendiri. Semakin benturan itu sedikit, maka sesungguhnya semakin matang kebudayaan masyarakat bersangkutan, demikian juga sebaliknya. Semakin besar kepercayaan suatu masyarakat akan maksud pihak-pihak lain, semakin besar pula pengertian terdapat di antara keduanya dan akan semakin terhindar pula masyarakat dari adanya konflik. Hal inilah yang menjadi proyek bersama seluruh masyarakat Indonesia, sebab kematangan kebudayaan politik masyarakat Indonesia sangatlah diharapkan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pembangunan nasionalisme dalam mengatasi konflik yang bernuansa SARA di Indonesia. Tanpa nasionalisme tidak ada kemajuan, tanpa nasionalisme tidak ada bangsa.

Penutup

Rasa kebangsaan atau nasionalisme harus dibangun sedini mungkin secara massif pada setiap insan Indonesia, karena ia merupakan modal untuk mengikis konflik bernuansa SARA yang

¹⁵*Ibid.*, h. 151.

kerapkali melanda bangsa ini. Penanaman nasionalisme harus diusahakan secara bersama sebagai sebuah paradigma berpikir dan bertindak yang tiada henti agar bangsa ini tidak direpotkan dengan berbagai macam konflik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Nasionalisme berkaitan dengan spirit, birahi ataupun semangat kebangsaan yang sejatinya tidak boleh tergoyahkan oleh terpaan badai maupun topan sekalipun. Rasa kebangsaan laksana batu karang di tengah lautan yang tetap tegar, meskipun diterjang gelombang lautan. Selain itu, nasionalisme memang dianjurkan oleh doktrin setiap agama, salah satunya Islam yang mengajarkan “*Hubbu al-Wathan min al-îmân* = Nasionalisme sebagian dari Iman”.

Daftar Pustaka

- Anthony D. Smith, *Nationalism: Theory, Ideology and History*, Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2001.
- Barbara Goodwin, *Using Political Ideas*, fourth edition, John Wilery & Sons Ltd, 2003.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama; Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, Jakarta : RM Books, 2011.
- Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca : Cornell University Press, 1962.
- Idrus Ruslan, “Merawat Nasionalisme”, dalam *Lampung Post*, 12 Mei 2012.
- Lambang Trijono, “Kebangkitan Nasional Memasuki Pertengahan Abad 21”, dalam Agus Wahyudi (ed.), *Seandainya Setiap Orang Indonesia Merdeka*, Yogyakarta : PSP UGM, 2008.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Syamsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer*, Malang : UMM Press. 2009.

Idrus Ruslan: 'MEMBANGUN' NASIONALISME.....

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XI, Jakarta :
Delta Pamungkas, 1997.

Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila*, Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2011.